

Membangun Citra Internasional Jepang: Strategi Bahasa Diplomatik Pidato Fumio Kishida di Konferensi Jepang-Ukraina untuk Promosi Pertumbuhan Ekonomi dan Rekonstruksi

Nurillah Rizqi Oktaviani¹, Nursidah Nursidah²

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

Received:15-01-2025; Revised:22-02-2025; Accepted:07-03-2025; Published:13-03-2025

Abstract

This study examines Japan's diplomatic language strategies through Prime Minister Fumio Kishida's speech at the Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction. Using Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA), the research investigates how diplomatic language tools like politeness, modality, and metaphors construct Japan's international image as a committed and peace-oriented nation. The study focuses on three dimensions: text, discursive practices, and social practices, to analyze linguistic elements and their broader socio-political contexts. The findings highlight that Kishida employs specific linguistic choices to convey Japan's solidarity and support for Ukraine amidst geopolitical challenges. Through the use of modality, Kishida reinforces Japan's authoritative yet empathetic stance, framing its support as both a moral and strategic obligation. Politeness strategies are used to establish rapport and mitigate potential tensions, while metaphors such as "investment in the future" redefine Japan's contributions as mutually beneficial, transcending traditional aid narratives. The research reveals that Kishida's rhetoric strategically positions Japan within the global community as a reliable ally and a proactive participant in addressing international crises. By aligning linguistic strategies with Japan's foreign policy objectives, the speech reflects broader ideological constructs and power relations within global geopolitics. This study underscores the significance of diplomatic language as a tool for fostering international collaboration, enhancing Japan's global reputation, and promoting shared values of peace, stability, and economic development.

Keywords: Diplomatic language; Critical Discourse Analysis; Japan-Ukraine relations; Fumio Kishida; international image-building

1. Pendahuluan

Dunia global yang semakin terhubung menjadikan komunikasi internasional memiliki peran penting dalam membangun hubungan antarnegara. Komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan kepentingan negara, memfasilitasi dialog, mencapai kesepakatan bersama, serta memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, keamanan, dan budaya (Setiawan & Daryato 2018; Raharjo, 2021; Yoshimatsu, 2010). Selain itu, komunikasi membantu mengatasi kesalahpahaman, mencegah konflik, dan membangun kepercayaan antarnegara (Masreng, 2015; Syawaludin, Muhammad, 2019; Almahasees, & Mahmoud, 2022). Pidato kenegaraan menjadi sarana strategis dalam diplomasi internasional untuk menyampaikan visi, misi, dan pandangan negara terhadap isu global. Pidato juga memainkan peran untuk membentuk citra positif suatu negara dan

² Corresponding Author. E-mail: nursidah@unhas.ac.id
Telp: +62-81241639510

mendorong kerjasama lintas-bidang (Raharjo, 2021; Setiawan, & Daryanto, 2018; Shetler-Jones, 2022).). Sebagai alat komunikasi formal, pidato mendukung diplomasi dengan menyampaikan pesan secara sopan, bijaksana, dan efektif untuk menjaga hubungan positif (Fairclough, 2006; Raharjo, 2021; Masreng, 2015; Setiawan, 2017). Dalam beberapa dekade terakhir, pidato kenegaraan telah menjadi instrumen vital untuk menyampaikan kebijakan luar negeri dan agenda diplomatik, mencerminkan kepemimpinan serta arah politik negara di arena internasional (Fairclough, 2006; Almahasees, & Mahmoud, 2022; Chouliaraki, & Fairclough, 2010).

Dalam komunitas global, Jepang memainkan peran penting dengan menegaskan komitmennya terhadap tatanan internasional yang bebas, terbuka, dan berbasis aturan hukum (Chouliaraki, & Fairclough, 2010; Yamamoto, 2018; Almahasees, & Mahmoud, 2022; Nippon.com, 2025) Sebagai pemimpin G7 pada tahun 2023, Perdana Menteri Fumio Kishida secara aktif memobilisasi dukungan internasional untuk Ukraina, termasuk melalui konferensi G7 yang pertama, di mana ia menekankan pentingnya memperkuat dukungan terhadap Ukraina dan meningkatkan sanksi terhadap Rusia (Chouliaraki, & Fairclough, 2010; Almahasees, & Mahmoud, 2022; Nippon.com, 2025). Pernyataan bersama G7 mengecam keras agresi Rusia, menyebutnya sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan menyerukan upaya kolektif untuk melawan kapasitas Rusia dalam melanjutkan perang ilegalnya (Pugliese, 2016; Peter, & Maurice 2021; O'Shea & Maslow, 2024). Selain itu, Jepang terus memajukan doktrin Free and Open Indo-Pacific, yang awalnya dirumuskan oleh Abe Shinzō dan dilanjutkan oleh para penerusnya, sebagai upaya untuk memperkuat kepemimpinan Jepang dalam membangun tatanan *Indo-Pasifik* yang berbasis aturan (Nippon.com, 2025; Raharjo, 2021). Di bawah kepemimpinan Kishida, Jepang menunjukkan tekad untuk melampaui inisiatif regional dan berkontribusi pada isu-isu global (Nippon.com, 2025; Raharjo, 2021).

Analisis Wacana Kritis (AWK) yang dikemukakan Fairclough dapat digunakan sebagai pendekatan untuk menganalisis strategi bahasa diplomatik dalam pidato kenegaraan, teori yang menyatukan analisis tekstual dengan konteks sosial yang lebih luas (Fairclough, 2006; Marzuki, 2021; Eriyanto, 2012; Setiawan, & Daryanto, 2018). Fairclough mengemukakan bahwa bahasa berfungsi sebagai alat praktik kekuasaan, di mana wacana menciptakan pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial (Fairclough, 2006; Chouliaraki & Fairclough, 2010; Peter & Maurice, 2021). Fairclough menekankan hubungan antara teks mikro (struktur kalimat) dengan konteks makro (konteks sosial dan ideologi yang lebih luas) (Fairclough, 2006; Yoshimatsu, 2010; Marzuki, 2021). Dimensi analisisnya mencakup teks, produksi teks, dan dimensi sosiokultural, yang dapat mengungkap bagaimana ideologi, kekuasaan, dan hubungan sosial terbentuk melalui bahasa dalam pidato kenegaraan, (Fairclough, 2006; Eriyanto, 2012; Raharjo, 2021). Modalitas, metafora, dan strategi kesantunan merupakan elemen penting dalam analisis ini untuk memahami bagaimana bahasa mendukung kekuasaan dan memengaruhi persepsi pendengar (Fairclough, 2006; Chouliaraki, & Fairclough, 2010; Yamamoto, 2018; Almahasees, & Mahmoud, 2022).

Dalam analisis wacana kritis, metafora tidak hanya sekadar hiasan bahasa, tetapi juga membentuk cara kita memahami realitas dan membongkar wacana kekuasaan. Menurut Fairclough, metafora tidak hanya merupakan elemen gaya dalam bahasa sastra, seperti yang umumnya diyakini, tetapi juga merupakan aspek mendalam dalam semua bentuk bahasa, termasuk wacana ilmiah dan teknis. Metafora memiliki peran yang lebih fundamental daripada sekadar hiasan; ia membentuk dan mengarahkan cara kita berpikir, bertindak, dan memahami realitas. Ketika suatu ide atau konsep dimetaforkan dengan cara tertentu, kita

tidak hanya menggambarkannya, tetapi secara aktif membangun dan membentuk pemahaman serta keyakinan sosial kita melalui metafora tersebut. Fairclough menekankan bahwa metafora bukan sekadar perangkat linguistik, melainkan alat yang membangun realitas sosial. Misalnya, dalam konteks wacana pendidikan, metafora seperti "komoditas" atau "pasar" dapat mengubah cara kita memandang institusi pendidikan, menjadikannya seolah-olah berfokus pada transaksi dan konsumen. Selain itu, metafora dapat menyusup dalam kehidupan sehari-hari sedemikian rupa sehingga banyak di antaranya terinternalisasi dalam budaya dan kita tidak menyadarinya lagi, atau bahkan sulit untuk melepaskan diri darinya. Metafora juga terlibat dalam perjuangan ideologis dalam praktik wacana. Contohnya adalah penggunaan metafora perang dalam kampanye politik, di mana argumen dan perdebatan diposisikan sebagai pertarungan fisik yang harus dimenangkan, bukan diskusi rasional. Melalui cara media membingkai isu, metafora ini turut membentuk cara kita berpikir tentang politik dan hubungan internasional. (Fairclough, 2006: 194-198)

Kesantunan berkaitan erat dengan kekuatan. Kekuatan terfokus pada kesopanan dalam tindak tutur saat melakukan janji, pemberitahuan, permintaan, saran, dan situasi lainnya. Konsep kesantunan didasarkan pada pemahaman bahwa peserta dalam interaksi bertujuan untuk memastikan tidak ada yang merasa malu. Kesantunan dibangun atas pemikiran bahwa partisipan dalam melakukan interaksi bertujuan untuk meyakinkan tidak ada 'kehilangan muka'. Dalam analisis wacana kritis, kesantunan dipandang secara implisit memperlihatkan relasi kekuasaan. (Brown & Levinson dalam Fairclough 2006: 162) Kesantunan berbahasa menurut Brown & Levinson dalam Fairclough (2006: 162-163) menjelaskan bahwa strategi kesantunan positif bertujuan untuk membangun dan memelihara hubungan baik dengan audiens. Dalam kesantunan berbahasa umumnya setiap orang memiliki dua 'muka' yaitu 'muka positif' dan 'muka negatif'. 'Muka positif' adalah wajah yang ingin dipandang baik, dipahami, dan disukai oleh orang lain. Penggunaan kesantunan positif tidak hanya berfungsi untuk mempererat hubungan, tetapi juga untuk menghindari ancaman terhadap muka pendengar (*Face-Threatening Acts/FTA*), seperti kritik atau instruksi langsung, yang dapat menciptakan ketegangan. Beberapa aturan kesantunan positif milik Brown & Levinson (dalam Fairclough, 2006: 162-165) seperti, memberikan perhatian, melibatkan penutur dalam komunikasi, memperhatikan keinginan mitra tutur, memberikan janji, dll. Sedangkan beberapa aturan kesantunan negatif seperti, permintaan maaf, menunjukkan sikap pesimis, pernyataan personalisasi, dll. Sedangkan, 'muka negatif' adalah wajah yang tidak ingin ditindas atau dihalangi oleh orang lain. Penggunaan kesantunan negatif, bertujuan untuk menghindari pemaksaan atau ancaman terhadap kebebasan bertindak seseorang.

Modalitas berkaitan dengan struktur tata bahasa. Properti modalitas mengacu pada kekuatan dari proposisi atau pernyataan yang disampaikan. Modalitas berhubungan dengan otoritas pembicara atau penulis dan mencakup dua dimensi, tergantung pada orientasi otoritas ini. Yang pertama adalah modalitas interaksional, yang mencerminkan otoritas partisipan dalam hubungannya dengan orang lain. Yang kedua adalah modalitas ekspresif, yang mengindikasikan penilaian pembicara atau penulis tentang kebenaran atau kemungkinan suatu pernyataan, yang berfungsi sebagai evaluasi terhadap realitas. Sebagai fitur tata bahasa utama dari klausa, modalitas berhubungan dengan fungsi interpersonal bahasa. Dalam setiap ujaran, pembuat ujaran harus menunjukkan tingkat komitmen mereka atau derajat kedekatan mereka terhadap suatu proposisi, sebuah konsep yang diistilahkan oleh Hodge dan Kress (1988). Dengan demikian, setiap pernyataan memiliki tingkat modalitas tertentu, atau "dimodalisasi". Secara tradisional, modalitas dalam tata bahasa telah

dikaitkan dengan kata kerja bantu modalitas seperti “harus”, “boleh”, “dapat”, dan “seharusnya, yang merupakan alat utama untuk mengekspresikan modalitas. Cara lain termasuk kata keterangan modalitas misalnya, “mungkin”, “mungkin”, “jelas”, dan “tentu saja”. Modalitas dapat berupa subjektif atau objektif. Dalam bahasa Jepang, modalitas ditunjukkan dalam pola kalimat seperti *なければなりません* (*nakereba narimasen*) untuk menunjukkan keyakinan, pola kalimat *てください* untuk meminta izin, pola kalimat *ほしい* untuk menyatakan keinginan, dan sebagainya.³ Modalitas subjektif secara eksplisit menyampaikan sikap pribadi pembicara terhadap suatu proposisi, sedangkan modalitas objektif meninggalkan dasar subjektif secara implisit, sehingga tidak jelas perspektif siapa yang diwakili. Penggunaan modalitas objektif sering kali menyiratkan pelaksanaan kekuasaan. Sebagai dimensi utama dari wacana, modalitas memainkan peran sentral dalam interaksi sosial dan lebih meresap daripada yang diakui secara tradisional. Signifikansi sosialnya dapat diukur dari sejauh mana modalitas proposisi diperebutkan, terbuka untuk diperjuangkan, dan tunduk pada transformasi. (Fairclough, 2006: 158-160).

Penelitian mengenai analisis wacana kritis dalam pidato kenegaraan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir (Fairclough, 2006; Chouliaraki & Fairclough, 2010; Syawaludin, 2019; Almahasees, & Mahmoud, 2022), tentang retorika dalam pidato politik global menggunakan analisis wacana kritis untuk menggali ideologi yang tersembunyi dalam wacana para pemimpin dunia, terutama terkait dengan globalisasi dan kebijakan luar negeri. Lebih spesifik, dalam konteks Jepang, penelitian oleh Hasegawa (2016) mengkaji penggunaan metafora dalam pidato politik Jepang, yang menunjukkan bagaimana penggunaan bahasa dapat membangun citra negara yang berorientasi pada perdamaian dan stabilitas internasional. Penelitian lebih lanjut oleh Yamamoto (2018) melaporkan peran kesantunan dalam komunikasi diplomatik Jepang, di mana ia menemukan bahwa kesantunan berperan penting dalam menjaga hubungan internasional yang harmonis dan mengurangi ketegangan politik. Beberapa penelitian menekankan pentingnya bahasa dalam membentuk kebijakan luar negeri dan posisi negara di dunia internasional (Chouliaraki & Fairclough, 2010; Yamamoto, 2018).

Meskipun penelitian terkait wacana diplomatik Jepang telah dilakukan sebelumnya, tetapi belum banyak yang secara spesifik mengkaji pidato Perdana Menteri Fumio Kishida dalam konteks konferensi internasional terbaru, khususnya dalam *Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction*, tahun 2023. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji bagaimana strategi bahasa digunakan oleh Perdana Menteri Kishida untuk memperkuat hubungan diplomatik Jepang, membangun citra negara yang mengedepankan komitmen pada perdamaian, dan memengaruhi persepsi internasional. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan modalitas, metafora, dan kesantunan dalam pidato tersebut dalam rangka mengungkapkan ideologi Jepang terkait perdamaian, keamanan, dan stabilitas global (Kishida, 2024; Tsuchiya, 2021).

Permasalahan utama dalam penelitian ini tentang penggunaan bahasa dalam pidato Perdana Menteri Jepang, PM Kishida, khususnya *Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction* pada 2024, mencerminkan strategi diplomatik yang mendukung tujuan Jepang dalam memperkuat posisi internasionalnya. Hipotesis yang diajukan adalah bahwa pidato tersebut menggunakan teknik retorika dan strategi bahasa yang

³ Matsuoka dalam Dedi Sutedi: *Dasar-Dasar Linguistik Bahasa Jepang*, 2014:101-103

sangat dipilih untuk memperkuat citra Jepang sebagai pemimpin yang berkomitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional (Wodak & Meyer, 2009; Kress & van Leeuwen, 2006).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana Perdana Menteri Fumio Kishida menggunakan strategi bahasa diplomatik untuk memperkuat citra Jepang di dunia internasional, khususnya terkait dengan komitmen pemerintah Jepang terhadap perdamaian dan pembangunan global. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang penggunaan bahasa dalam diplomasi internasional dan memperkaya literatur mengenai komunikasi politik dan analisis wacana di arena global (van Dijk, 2008; Holtz-Bacha & Norris, 2001).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang obyek penelitian difokuskan pada teks pidato PM Fumio Kishida dalam *Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction*, yang diakses dari situs resmi pemerintah Jepang www.kantei.go.jp. Teks kemudian disalin ke format digital untuk memastikan keakuratan dan kemudahan analisis. Selain itu, dokumen pendukung seperti laporan resmi, siaran pers, artikel berita, dan analisis dari media terpercaya juga dikumpulkan untuk memberikan konteks tambahan. Data kemudian dikategorisasi berdasarkan analisis bahasa diplomatik untuk memahami bagaimana Jepang membangun citra dan posisinya dalam hubungan internasional, khususnya dengan Ukraina. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan pendekatan *Analisis Wacana Kritis* Fairclough, dengan fokus pada elemen-elemen bahasa diplomatik seperti kesantunan, modalitas, retorika, dan konteks sosial-politik. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali bagaimana PM Kishida menggunakan strategi bahasa untuk memperkuat hubungan diplomatik, membangun kepercayaan, dan mengomunikasikan nilai-nilai Jepang dalam konteks global.

3. Hasil dan Pembahasan

Dalam hubungan internasional, bahasa memainkan peran penting sebagai alat diplomasi yang efektif. Bahasa diplomatik tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi antarnegara, tetapi juga sebagai alat untuk menyampaikan pesan yang bermuatan strategis dalam menjaga kepentingan nasional, membangun kerja sama internasional, dan meredakan ketegangan. Pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dalam *Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction* menjadi salah satu contoh penting dimana strategi bahasa diplomatik digunakan untuk memperkuat hubungan bilateral sekaligus memberikan respon terhadap situasi geopolitik yang sensitif. Berikut, penulis menyajikan data yang menggambarkan citra Jepang dalam komunitas internasional melalui pidato Perdana Menteri Fumio Kishida.

Data 1

③日本はこれまでも、そしてこれからもウクライナと共にあります。

Nihon wa kore made mo, soshite kore kara mo ukuraina to tomo ni arimasu.

(日・ウクライナ経済復興推進会議、2024)

Jepang telah dan akan terus bersama Ukraina.

(Promosi Pertumbuhan dan Rekonstruksi Ekonomi, 2024)

Pada data 1 kalimat 3, Kishida menyatakan dukungannya terhadap Ukraina, menekankan dukungan Jepang terhadap Ukraina dalam situasi konflik dan pemulihan. Kishida menggunakan kata 日本 (*nihon*) yang diikuti oleh partikel は (*wa*). Penggunaan partikel は (*wa*) berfungsi untuk menunjukkan bahwa kata sebelumnya adalah topik kalimat. (Ogawa, 2012: 14) Kishida menandakan Jepang sebagai topik utama kalimat, menempatkan Jepang sebagai subjek yang bertanggung jawab atas tindakan dan komitmen yang dinyatakan. Selanjutnya, frasa これまでも (*kore made mo*) yang berarti 'hingga saat ini' dan これから も (*kore kara mo*)⁴ yang berarti 'dan akan terus' secara tegas menandakan kesinambungan dari peran Jepang yang konsisten dalam mendukung Ukraina. Selain itu, Penggunaan pola kalimat と共に (*to tomo ni*) yang berarti 'bersama dengan' dengan nuansa saling mendukung satu sama lain⁵ memperlihatkan bahwa Jepang telah secara konsisten berada di pihak Ukraina.

Menurut teori modalitas milik Fairclough, (2006, 158-160) bahasa berfungsi untuk mengungkapkan hubungan sosial dan otoritas pembicara. Modalitas ekspresif ditunjukkan dalam pernyataan Kishida, pola と共に (*to tomo ni*), yang berarti "bersama dengan," mencerminkan hubungan yang erat antara Jepang dan Ukraina, serta saling mendukung. Kishida menunjukkan bahwa Jepang menempatkan dirinya sebagai sekutu strategis dan simbol solidaritas dalam wacana internasional. Pernyataan Kishida juga mengandung modalitas objektif, karena keyakinan Jepang atas posisinya dalam mendukung Ukraina tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi Kishida, tetapi juga posisi resmi Jepang sebagai negara. Hal ini menunjukkan kekuatan diskursif Jepang dalam membangun solidaritas global tanpa terlibat dalam dukungan militer, sesuai dengan batasan konstitusionalnya. Pernyataan Kishida mengenai dukungan Jepang terhadap Ukraina menunjukkan penggunaan modalitas yang memperkuat otoritas dan solidaritas Jepang dalam hubungan internasional. Dengan menggunakan modalitas ekspresif dan objektif, Kishida mengungkapkan keyakinan yang tegas tentang komitmen Jepang di masa kini dan masa depan. Melalui pilihan bahasa, termasuk frasa これまでも (*kore made mo*) dan これからも (*kore kara mo*), serta pola kalimat と共に (*to tomo ni*), Jepang secara konsisten memposisikan dirinya sebagai mitra strategis yang mendukung Ukraina, memperkuat legitimasi wacana bilateral yang inklusif dan penuh solidaritas.

Data 2

(¹²)我々は、我々全員の未来のために努力しなければなりません。

Ware ware wa, ware ware zennin no mirai no tame ni doryoku shinakerebanarimasen.

(日・ウクライナ経済復興推進会議、2024)

Kita harus melakukannya demi masa depan kita semua.

(Promosi Pertumbuhan dan Rekonstruksi Ekonomi, 2024)

⁴ Mazi (1994, 542)

⁵ Mazii, diakses pada 23 Sep. 2024

Pada data 2, Kishida menjelaskan mengenai pentingnya upaya bersama untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Kishida menekankan kewajiban moral dan tanggung jawab bersama dalam kontribusi untuk mencapai masa depan bersama, khususnya dalam pemulihan ekonomi Ukraina. Penggunaan frasa 我々全員 (*ware ware zennin*) yang berarti ‘kita semua’⁶ menegaskan bahwa keharusan ini berlaku untuk semua orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut, tanpa terkecuali. Selain itu, penggunaan pola kalimat なければなりません (*nakereba narimasen*), menunjukkan kewajiban atau sesuatu yang tidak bisa dihindari, yaitu tindakan tersebut mutlak diperlukan. Pola kalimat なければなりません (*nakereba narimasen*) digunakan untuk menyatakan ‘keharusan’ atau ‘saran’ kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. (Ogawa, 2012: 110)

Kishida menggunakan modalitas keharusan yang ditandai dengan penggunaan pola kalimat ‘なければなりません’ (*nakereba narimasen*), yang menunjukkan keharusan atau kewajiban. Pola kalimat なければなりません (*nakereba narimasen*) menunjukkan bahwa tindakan yang harus dilakukan tidak bisa dihindari dan merupakan kewajiban yang mutlak. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak ada pilihan lain selain untuk bertindak demi masa depan bersama, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi Ukraina. Dengan menggunakan pola なければなりません (*nakereba narimasen*), Kishida mengimplikasikan bahwa kontribusi untuk pemulihan ekonomi Ukraina bukan hanya suatu pilihan, tetapi suatu kewajiban yang mendesak. Pernyataan Kishida mencerminkan strategi diskursif yang menggunakan modalitas keharusan untuk memperkuat urgensi tindakan kolektif. Kishida tidak hanya mengundang audiens untuk berpartisipasi, tetapi juga menekankan bahwa tindakan tersebut adalah kewajiban moral dan sosial yang harus dilakukan oleh setiap individu.

Menggunakan modalitas (*nakereba narimasen*) ‘keharusan’, menandakan bahwa Kishida ingin menekankan bahwa tidak ada pihak yang dapat menghindar dari tanggung jawab kolektif. Berdasarkan teori modalitas Fairclough (2006, 158-160), penggunaan pola kalimat yang menyatakan keharusan merupakan cara untuk menciptakan konsensus sosial dan memperkuat norma-norma kolektif di dalam wacana. Dalam hal ini, Kishida tidak hanya mengajak audiens untuk bertindak, tetapi juga membangun pemahaman bahwa upaya bersama adalah hal yang esensial untuk masa depan yang lebih baik, khususnya bagi Ukraina yang tengah menjalani proses pemulihan. Kishida menunjukkan penggunaan modalitas keharusan untuk menekankan kewajiban moral dan sosial bagi semua individu yang terlibat dalam konferensi yang diadakan. Dengan kata lain, Kishida berusaha untuk menyampaikan bahwa kontribusi terhadap pemulihan ekonomi Ukraina adalah kewajiban bersama yang harus dipenuhi oleh setiap orang, tanpa pengecualian. Hal ini memperlihatkan bahwa melalui bahasa, Kishida membangun rasa tanggung jawab kolektif dan kesadaran akan pentingnya upaya bersama untuk masa depan yang lebih baik.

Data 3

⁽⁹⁾ 「未来への投資」です。

Mirai e no toushi desu.

⁶ Mazii, diakses pada 20 Sep. 2024

Investasi masa depan.

(經濟復興推進会議、2024)

(Promosi Pertumbuhan dan Rekonstruksi Ekonomi, 2024)

Pada data 3, metafora 未来への投資 (*mirai e no toushi*) memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan cara kita memahami hubungan Jepang dengan Ukraina. Dengan menggunakan istilah 投資 (*toushi*) ‘investasi’⁷ daripada "bantuan," Kishida secara strategis mengubah narasi mengenai kontribusi Jepang kepada Ukraina. Dalam hal ini, kata 投資 (*toushi*) ‘investasi’ memberikan kesan bahwa dukungan Jepang bukan sekadar amal atau bantuan kemanusiaan, melainkan sebuah keputusan rasional yang melibatkan harapan untuk timbal balik yang menguntungkan di masa depan. Ini menciptakan wacana yang lebih berfokus pada hubungan yang saling menguntungkan dan berbasis pada kerjasama jangka panjang, mengontraskan dengan wacana bantuan yang lebih bersifat satu arah dan temporal. Metafora 未来への投資 (*mirai e no toushi*) atau ‘investasi masa depan’ adalah istilah yang dipilih Kishida untuk membingkai kontribusi Jepang terhadap Ukraina. Kishida berupaya untuk memosisikan dukungan Jepang sebagai tindakan yang menguntungkan, bukan sekadar bentuk amal atau bantuan kemanusiaan. "Investasi" dalam konteks pidato Kishida membawa konotasi bahwa Jepang memiliki harapan akan timbal balik atau hasil positif di masa mendatang dari kontribusi yang diberikan sekarang. Kishida menciptakan makna yang menegaskan posisi Jepang sebagai mitra yang berorientasi pada manfaat bersama, baik bagi Jepang maupun Ukraina.

Penggunaan metafora 未来への投資 (*mirai e no toushi*) sangat terikat dengan ideologi ekonomi dan nilai kapitalis, sebagaimana yang dibahas oleh Fairclough (2006: 194-198). Metafora 未来への投資 (*mirai e no toushi*) menyiratkan adanya prinsip kapitalisme yang lebih luas, di mana kontribusi Jepang terhadap Ukraina diharapkan menghasilkan keuntungan jangka panjang, baik dalam hal keamanan maupun ekonomi global. Dalam konteks ini, Jepang tidak hanya dilihat sebagai pemberi bantuan, tetapi juga sebagai investor yang menganggap penting stabilitas Ukraina untuk keseimbangan ekonomi dan politik global. Dengan demikian, Jepang diposisikan sebagai negara yang pragmatis, berorientasi pada hasil jangka panjang, yang berfokus pada manfaat bersama yang dapat diperoleh kedua negara. Seperti yang dijelaskan oleh Fairclough (2006: 194-198), beberapa metafora menjadi sangat dinaturalisasi dalam budaya sehingga kita sulit untuk melihatnya atau melarikan diri darinya. Dalam hal ini, metafora 未来への投資 (*mirai e no toushi*) dianggap sebagai bentuk normalisasi kapitalisme dalam wacana internasional, yang menjadikan logika pasar sebagai kerangka pemikiran utama dalam hubungan antar negara. Ini menunjukkan bagaimana ideologi kapitalis dan ekonomi pasar bebas terinternalisasi dalam cara negara-negara berinteraksi satu sama lain di arena global. Metafora ini mengonfirmasi bahwa hubungan internasional, dalam banyak kasus, semakin dipandang melalui lensa nilai-nilai ekonomi dan perdagangan. Kishida tidak hanya mengomunikasikan niat jangka panjang Jepang, tetapi juga berupaya membangkitkan rasa optimisme dan harapan.

⁷ Matsura (1994, 1.102)

Data 4

(1) シュミハリ首相、御列席の皆様最初に、ロシアによるウクライナ侵略開始から2年もの間、自由と独立を守るために奮闘しているウクライナ国民の勇気と忍耐に改めて敬意を表します。(2) 日本は昨年G7議長国としてウクライナ支援に関する議論を主導し、財政支援を含む強力な支援をしてきました。

Syumihari syuusho, goresseki no minna sama Saisho ni, rojia ni yoru ukuraina shinryaku kaishi kara 2 nen mono aida, jiyuu to dokuritsu wo mamoru tame ni funtoushiteiru ukuraina kakumin no yuuki to nintai ni aratamete keii wo hyoushimasu. Nihon wa sakunen G7 gichoukoku toshite ukuraina shien ni kansuru giron wo shuudoushi, zaisei shien wo fukumu kyouryoku na shien wo shitekimashita.

(日・ウクライナ経済復興推進会議、2024)

Perdana Menteri Shmyhal dan hadirin yang terhormat, Pertama-tama, saya ingin menyatakan **rasa hormat saya** terhadap keberanian dan ketabahan rakyat Ukraina yang telah berjuang selama dua tahun untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan mereka. **Sebagai ketua G7** tahun lalu, Jepang memimpin diskusi mengenai dukungan untuk Ukraina dan telah memberikan dukungan yang kuat, termasuk bantuan keuangan.

(Promosi Pertumbuhan dan Rekonstruksi Ekonomi, 2024)

Pada data 4, frasa 敬意を表します (*keii wo hyoushimasu*) yang berarti ‘menyatakan rasa hormat’ kata 敬意 (*keii*) yang berarti ‘penghormatan atau rasa hormat’⁸ diikuti dengan kata 表します (*hyoushimasu*) yang berarti ‘menyatakan atau mengucapkan.’⁹ Melalui frasa 敬意を表します (*keii wo hyoushimasu*), Kishida menunjukkan bahwa ia memperhatikan dan menghargai aspek emosional dan moral dari perjuangan Ukraina. Kishida sebagai penutur mencoba untuk menciptakan hubungan yang lebih erat dengan audiens dengan cara memberikan pengakuan. Selain itu, pada data 13 kalimat 2, Kishida menekankan bahwa Jepang, sebagai ketua G7, telah memimpin diskusi internasional mengenai dukungan untuk Ukraina dan memberikan bantuan yang signifikan, termasuk bantuan keuangan. Berdasarkan teori kesantunan positif Brown dan Levinson (dalam Fairclough, 2006: 163-165), Kishida menggunakan salah satu strategi kesantunan positif yaitu memberikan perhatian. Kishida memberi perhatian pada kebutuhan dan kepentingan mitra, dengan mengutarakan kebutuhan Ukraina akan kebebasan dan kemerdekaan, Kishida memperlihatkan upaya Jepang untuk membangun hubungan yang lebih erat dengan Ukraina melalui empati dan pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Pidato yang disampaikan bertujuan untuk menyampaikan dukungan, dan juga memperkuat solidaritas moral antara Jepang dan Ukraina. Hal ini penting dalam konteks hubungan internasional karena memperkuat solidaritas moral antara Jepang dan Ukraina. Kishida juga memperlihatkan upaya Jepang dalam membangun citra sebagai negara yang

⁸ Matsura (1994, 459)

⁹ Mazii diakses pada 15 Sep. 2024

peduli dan berempati terhadap krisis global. Dengan ‘menyatakan penghormatan’, Kishida membangun kesan bahwa Jepang bukan hanya negara yang memberikan dukungan finansial atau teknis, tetapi juga negara yang memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Pengakuan terhadap perjuangan Ukraina mencerminkan komitmen Jepang untuk berperan sebagai negara yang tidak hanya mendukung dari segi materi, tetapi juga dari sisi moral. Selain itu, penggunaan kesantunan positif tidak hanya berfungsi untuk mempererat hubungan, tetapi juga untuk menghindari ancaman terhadap muka pendengar (*Face-Threatening Acts/FTA*), seperti kritik atau instruksi langsung, yang dapat menciptakan ketegangan. Kishida menggunakan pendekatan yang tidak konfrontatif, menghindari kritik atau instruksi langsung, dan sebaliknya, menciptakan citra Jepang sebagai sekutu yang peduli dan empatik. Kesantunan yang dilakukan Kishida mencerminkan relasi kekuasaan secara implisit. Dalam konteks ini, Kishida tidak hanya berbicara sebagai pemimpin Jepang, tetapi juga mewakili negara yang memiliki posisi penting di G7. Dengan menyebut kontribusi Jepang sebagai ketua G7, Kishida menegaskan peran Jepang sebagai aktor utama dalam komunitas internasional yang mendukung Ukraina.

Dalam pidatonya Kishida secara efektif menggunakan strategi kesantunan positif untuk memperkuat solidaritas diplomatik antara Jepang dan Ukraina. Melalui ungkapan seperti 敬意を表します (*keii wo hyoushimasu*), Kishida tidak hanya menunjukkan empati terhadap perjuangan rakyat Ukraina, tetapi juga memperkuat citra Jepang sebagai negara yang peduli terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Strategi ini berhasil menghindari ancaman terhadap muka pendengar (FTA) dan menciptakan hubungan yang lebih erat antara kedua negara. Selain itu, dengan menekankan peran Jepang dalam G7, Kishida memperlihatkan Jepang sebagai bagian dari komunitas internasional yang mendukung Ukraina, memperkuat solidaritas global dalam menghadapi krisis.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang digunakan menggunakan teori Analisis Wacana Kritis milik Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa strategi bahasa yang dipilih Kishida dalam pidatonya merupakan instrumen penting dalam membangun dan memelihara hubungan diplomatik dengan Ukraina. Dalam dimensi teks, Kishida menggunakan pemilihan kata, struktur kalimat, dan gaya bahasa yang mencerminkan kesan positif dan solidaritas, yang bertujuan memperkuat hubungan bilateral serta menegaskan dukungan Jepang kepada Ukraina di tengah situasi kritis. Pemilihan kata dan penyusunan pesan yang diplomatik mengindikasikan upaya Kishida untuk mempengaruhi persepsi dan respons Ukraina serta komunitas internasional. Pada dimensi praktik diskursif, pidato Kishida menggambarkan praktik komunikasi politik yang sarat dengan makna simbolis dan ideologis. Strategi bahasanya tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai bentuk pencitraan yang menggambarkan posisi Jepang yang mendukung stabilitas regional dan global, yang secara langsung berkaitan dengan relasi kekuatan dalam konteks geopolitik. Dengan menggunakan retorika yang tepat, Kishida berusaha membentuk persepsi positif dan meminimalisir potensi ketegangan, baik di hadapan Ukraina maupun di hadapan masyarakat internasional yang memantau kebijakan luar negeri Jepang. Sedangkan, pada dimensi praktik sosial, penggunaan bahasa diplomatik oleh Kishida merefleksikan struktur sosial dan politik yang lebih luas, dimana Jepang ingin memainkan peran penting dalam urusan internasional. Pendekatan strategi bahasa diplomatik menjadikan pidato berfungsi sebagai alat diplomasi yang merayu, meyakinkan, dan menegaskan posisi Jepang dalam kancah internasional. Pemilihan gaya bahasa yang inklusif dan penuh empati dalam pidato ini diharapkan dapat

menghasilkan dampak politik yang menguntungkan Jepang, baik dari segi dukungan terhadap Ukraina maupun dari peningkatan reputasi Jepang di komunitas global.

Referensi

- Almahasees, Z., & Mahmoud, S. (2022). Persuasive Strategies utilized in the Political Speeches of King Abdullah II: A Critical Discourse Analysis. *Cogent Arts & Humanities*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2082016>
- Chouliaraki, L. and Fairclough, N. (2010), Critical Discourse Analysis in Organizational Studies: Towards an Integrationist Methodology. *Journal of Management Studies*, 47: 1213-1218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2009.00883.x>
- Eriyanto. (2012). *Analisis Wacana Pengantar Teks Media*. Yogyakarta: LKiS Group
- Fairclough, N. (2014). *Language and Power*. London: Routledge.
- Fairclough, Norman. (2006) “Discourse and Social Change”. London and New York: *Longman Inc.*,
- Holtz-Bacha, C., & Norris, P. (2001). *Political communication in postmodern democracy: Implications for theory and research*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203416649>
- Kantei. (n.d.). *Prime Minister of Japan and His Cabinet* [Online]. Cabinet Secretariat, Tokyo. Diambil dari: <https://www.kantei.go.jp/> [Diakses pada: 24 Februari 2024].
- Kishida, F. (2023). Japan-Ukraine Conference for Promotion of Economic Growth and Reconstruction: A speech by Prime Minister Fumio Kishida. Official Transcript. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/>
- Kress, G., & van Leeuwen, T. (2006). *Reading images: The grammar of visual design*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203024024>
- Marzuki, Ismail (2021). *Analisis Wacana Kritis (Teori dan Praktik)*. UNIMUDA Press.
- Matsura, K. (1994). *Kamus Bahasa Jepang Indonesia*. Kyoto: Kyoto Sangyo University Press.
- Nippon.com. (2025). *Leadership in G7 Hiroshima Summit: An analysis of Japan’s role*. Diambil dari <https://www.nippon.com>
- O’Shea, P., & Maslow, S. (2024). Rethinking change in Japan’s security policy: punctuated equilibrium theory and Japan’s response to the Russian invasion of Ukraine. *Policy Studies*, 45 (3–4), 653–676. <https://doi.org/10.1080/01442872.2024.2309218>
- Peter B, & Maurice W, (2021) Speaker-audience intercommunication in political speeches: A contrast of cultures. *Journal of Pragmatics*, Vol. 186, 167-178, <https://doi.org/10.1016/j.pragma.2021.10.001>
- Pugliese, G. (2016). Kantei diplomacy? Japan’s hybrid leadership in foreign and security policy. *The Pacific Review*, 30(2), 152–168. <https://doi.org/10.1080/09512748.2016.1201131>

- Raharjo, (2021). Lintang Wahyu Charisa. "Peran Penting Komunikasi Internasional dalam Hubungan Masyarakat" . *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial* 97–103. <http://dx.doi.org/10.47233/jkomdis.v1i2.39>
- Setiawan, & Daryanto. (2018) Kebijakan Komunikasi Internasional Indonesia. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 22-33. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i1.1210>
- Shetler-Jones, P. (2022). UK–Japan Relations and the Indo-Pacific Tilt: The Cornerstone. *The RUSI Journal*, 167(6–7), 44–52. <https://doi.org/10.1080/03071847.2022.2158625>
- Sutedi, Dedi. (2014). *Dasar-Dasar Linguistik Bahasa Jepang*. Bandung: Penerbit Buku Pendidikan.
- Syawaludin, Muhammad. (2019). Analisis Wacana Kritis dalam Kumpulan Pidato Presiden Republik Indonesia Ke-7 Ir. Joko Widodo." *Jurnal Pembahsi Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*. 47-57. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v9i1.4244>
- Tsuchiya, A. (2021). Diplomatic Language in Japan's International Conferences: A study of Japan's Foreign Policy Discourse. *Asian Political Science Review*, 42(3), 354-371. <https://doi.org/10.1080/23450882.2021.1893216>
- Van Dijk, T. A. (2008). *Discourse and Power*. SAGE Publications.
- Wodak, R., & Meyer, M. (2009). *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781849209387>
- Yoshimatsu, H. (2010). Domestic Political Institutions, Diplomatic Style and Trade Agreements: A Comparative Study of China and Japan. *New Political Economy*, 15(3), 395–419. <https://doi.org/10.1080/13563461003602238>.